

ABSTRAK

Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen akibat adanya baju obral yang cacat produk dan pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap kerugian konsumen. Dalam hukum perlindungan konsumen sebagaimana diatur pada Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, tepatnya pada Pasal 4 menyebutkan salah satu hak dari konsumen ialah untuk mendapatkan barang yang layak dan sesuai dengan yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Namun banyak pelaku usaha yang membenarkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan yang besar, termasuk adanya cacat tersembunyi pada baju obral. Padahal Pasal 11 UUPK telah mengatur terkait larangan bagi pelaku usaha dalam melakukan penjualan barang secara obral untuk menyembunyikan dan/atau mengelabui konsumen. Dalam hal ini pelaku usaha bertanggung jawab terhadap kerugian konsumen akibat cacat produk pada baju obral. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode pengumpulan data berupa *library research*. Sebagai upaya pencegahan penjualan barang cacat produk secara obral, diperlukannya hukum yang lebih jelas mengatur sistem transaksi secara obral dan bagaimana ketentuan-ketentuan untuk bertransaksi secara obral agar transaksi obral lebih jelas. Peraturan yang lebih jelas dapat menjadi tindakan preventif agar para pelaku usaha tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang yang merugikan konsumen dan juga dapat bertanggung jawab dengan perbuatannya.

Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Cacat Produk, Transaksi Elektronik.

ABSTRACT

This thesis discusses the legal protection for consumers due to the sale of defective products and the responsibility of business actors for consumer losses. In the consumer protection law as regulated in Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Article 4 specifically states that one of the rights of consumers is to obtain goods that are appropriate and in accordance with those offered by business actors. However, many business actors justify any means to get big profits, including hidden defects in the clothes on sale. In fact, Article 11 of the UUPK has regulated the prohibition for business actors from selling goods on sale to hide and/or deceive consumers. In this case, the business actor is responsible for consumer losses due to product defects on sale clothes. This thesis uses a normative juridical research method with data collection methods in the form of library research. As an effort to prevent the sale of defective clothing items on sale, a clearer law is needed regarding the sale transaction system and how the provisions for sale transactions are made so that sales transactions are clearer. Even clearer regulations can be a preventive measure so that business actors do not carry out prohibited acts that harm consumers and can also be held responsible for their actions.

Keywords: Consumer Protection, Products Defects, Electronic Transaction.